

KEBIJAKAN AFIRMATIF DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

ABSTRAK

Keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas membuat mereka kesulitan untuk memperoleh kesejahteraan khususnya dalam mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu kebijakan afirmatif diperlukan agar penyandang disabilitas dapat memperoleh kesempatan yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan dalam pemenuhan haknya mendapatkan pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengkritisi dan mengevaluasi pengaturan hak penyandang disabilitas dalam hukum positif Indonesia di bidang ketenagakerjaan, fungsi kebijakan afirmatif bagi penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan, dan menformulasikan kebijakan afirmatif yang memenuhi rasa keadilan dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan. Sebagai penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan filsafat, pendekatan perbandingan dan pendekatan politik hukum. Analisis dilakukan dengan cara: menginventarisasi, mensistemasi, menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan dan memformulasikan peraturan perundang-undangan ke depan untuk memenuhi rasa keadilan dalam perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa hak penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan telah dijamin sebagai hak konstitusional di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan penyandang disabilitas, ketenagakerjaan, dan hak asasi manusia, namun dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tadi masih diperlukan tindakan nyata berupa kebijakan afirmatif berupa kemudahan aksesibilitas bangunan gedung dan sistem kuota untuk pemenuhan hak khususnya dalam memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan ke depannya memerlukan bentuk formulasi kebijakan afirmatif baru yang berdasarkan asas keadilan dengan memasukkan pengaturan sistem kuota dan jenis pekerjaan sesuai dengan ragam dan derajat kedisabilitasannya, serta pengaturan sanksi kepada pihak pemberi kerja yang tidak memenuhi kuota pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Dapat disimpulkan dalam pengaturan kebijakan afirmatif dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan dengan sistem kuota memerlukan penyempurnaan rumusan pasal dengan menambahkan jenis disabilitas dan derajat kedisabilitasannya serta sinkronisasi dengan peraturan yang memberikan kemudahan aksesibilitas. Kedepannya disarankan agar ada penerapan konsep *whole government* sebagai bentuk integrasi data sebagai upaya memberdayakan penyandang disabilitas, sehingga perlindungan pemenuhan hak pembinaan, dan pemberdayaan penyandang disabilitas khususnya di bidang ketenagakerjaan dapat terpenuhi.

Kata kunci:

hak, kebijakan afirmatif, ketenagakerjaan, penyandang disabilitas, perlindungan hukum.

AFFIRMATIVE ACTION IN PROVIDING PROTECTION AND FULFILLING THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES IN THE EMPLOYMENT FIELD

ABSTRACT

The limitations possessed by persons with disabilities make it difficult for them to obtain welfare, especially in getting a job. Therefore, affirmative actions are needed so that people with disabilities can get equal opportunities to achieve equality and justice in fulfilling their right to get a job. This aims of this researc are to analyze, criticize and evaluate the arrangements for the rights of persons with disabilities in Indonesia's positive law in the field of employment, teh function of affirmative actions for persons with disabilities in the field of employment, and formulating affirmative action that fulfill a sense of justice in providing protection an fulfillment of the rights of persons with disabilitise in the field of employment. As normative juridical research using statute approach, conceptual approach, philosophy approach, comparative approach, and legal political approach, The analysis is carried out by taking inventory, systematizing, interpreting laws and regulations relating to the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities in the field of employment and formulating future laws and regulations to fulfill a sense of justice in the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities in the field of employment. The results of this research show that the rights of persons with disabilities in the field of employment have actually been guaranteed as a constitutional rights in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, various law and regulations related to the persons with disabilities are still needed concrete action in the form of affirmative action. The protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities in the field of employment in the future requires a new form of affirmative action formulation based on, quota system and types of work according to the variety and degree of disability, and the principle of justice by including the setting of sanctions for sector who do not want to fulfill the employment quota for persons with disabilities. It can be concluded that in the setting affirmative policies in fulfilling the rights of persons with disabilities in obtaining jobs with a quota system, it requires refinement of the article formulation by adding the type of disability and degree of disability as well as synchronizing with regulations that provide easy accessibility. In the future, it is recommended that there be an application for the whole government concept as a form of data integration as an effort to empower persons with disabilities, so that the protection for fulfilling the right to development, and empowerment of persons with disabilities, especially in the field of employment can be fulfilled.

Key words:

Affirmative action, employment, legal protection, person with disabilities, rights.